

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2016

PERDA NO. 7, LD NO 7/2016, NOREG 7/255/2016, LL PEMPROV NTB: 11 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI NTB TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK : - APBD Provinsi NTB TA 2016 telah ditetapkan dengan Perda No. 11 Tahun 2015, namun karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a Permendagri No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, maka APBD Provinsi NTB TA 2016 perlu dilakukan perubahan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permenkeu No. 125 Tahun 2016, daerah diharuskan melakukan penyesuaian DAU Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 57 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 19 Tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 16 Tahun 2007, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 52 Tahun 2015, Permenkeu No. 125 Tahun 2016, Perda No. 1 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Perda No. 11 Tahun 2015 tentang APBD Provinsi NTB TA 2016 diantaranya Pasal 1 dimana APBD TA 2016 semula berjumlah Rp3.606.520.815.258,00 bertambah sejumlah Rp393.817.222.984,75 sehingga menjadi Rp4.000.338.038.242,75. Uraian lebih lanjut Perubahan APBD tercantum dalam Lampiran. Gubernur menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Oktober 2016 dan ditetapkan di Mataram pada tanggal 19 Oktober 2016.